

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Kata “prostitusi” berasal dari kata latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Kata-kata ini sejak zaman dahulu telah dipakai dalam perpustakaan Yunani Romawi untuk wanita-wanita yang menjual tubuhnya.²²

Selanjutnya, W.A. Bonger, dalam tulisannya *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitue*, menulis definisi sebagai berikut : “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”.²³ Hampir sama dengan devinisi P.J de Bruine Van Amstel, menyatakan “prostitusi adalah penyerahan diri wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran”.²⁴

Sedangkan G. May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* lebih menekankan pada masalah barter atau perdagangan secara tukar menukar, yaitu menukarkan pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah, atau barang lainnya.²⁵

²² J. Verkuy, *Etika Kristen Seksuil*, BPK Gunung Muria, Jakarta, 1984, h.132, dikutip oleh Gilbert & I Reinda Lumoindong, op.cit, h.23

²³ W.A. Bonger, *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitue*, Verspreide Geschriften, del II, Amsterdam, 1950 terjemahan B.Simanjutak, Mimbar Demokrasi, Bandung, April 1967 dikutip oleh Kartini Kartono, op.cit, h. 182 - 183

²⁴ Kartini Kartono, op.cit, h.183

²⁵ Ibid, h.184

Berbeda dengan apa yang dikemukakan Kartini Kartono, bahwa definisi prostitusi bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang sifatnya impersonal tanpa afeksi²⁶

2. Jenis-Jenis Prostitusi

Jenis-jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya; yaitu terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar.²⁷

1) Prostitusi yang terdaftar

Pelakunya diawasi oleh Kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial Dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapat suntikan serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum

2) Prostitusi tidak terdaftar

Termasuk di dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Para pelaku prostitusi dalam mencari “konsumen” (tamu) ada yang dilakukan sendiri dan ada pula yang dilakukan oleh calo dan panggilan.

²⁶ Ibid, h.185

²⁷ Kartini Kartono, op.cit, h.214

Pada umumnya mereka ini diragukan kesehatannya, karena mereka belum tentu memeriksakan kesehatannya pada dokter.

Sedangkan menurut jumlahnya, *prostitutue* (pelacur) dapat dibagi dalam²⁸

- a) *Prostitutue* yang beroperasi secara individual merupakan *single operator*, atau
- b) Prostitue yang bekerja dengan bantuan organisasi dan “sindikot” yang teratur rapi. Jadi mereka tidak bekerja sendiri, akan tetapi diatur melalui satu sistem kerja organisasi.

Sedangkan menurut tempat penggolongannya atau lokalisasinya prostitusi dapat dibagi menjadi²⁹

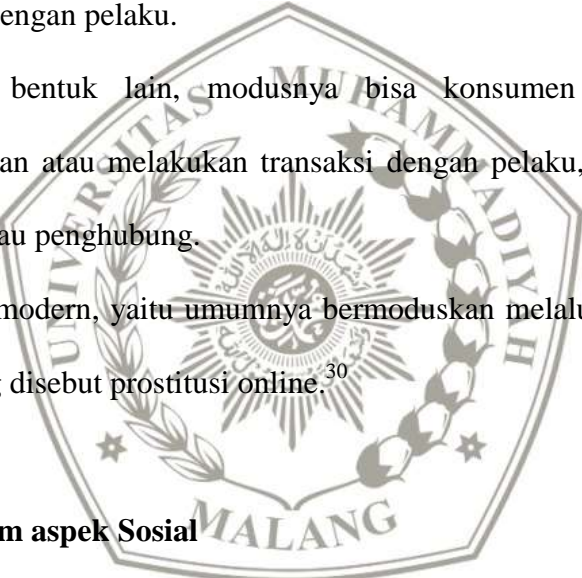
- a) segregasi atau lokalisasi, yang terisolir atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai “daerah lampu merah”, atau petak-petak tertutup
- b) rumah-rumah panggilan (*call home, parlour*)
- c) Di balik *front organisasi* atau dibalik bisnis-bisnis terhormat, misalnya apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap, dan pijat, dan lain-lain

3. Modus Operandi Prostitusi

Umumnya berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa modus atau cara-cara prostitusi digambarkan sebagai berikut :

²⁸ Ibid, h.215-216

²⁹ ibid,

- 
- a. Prostitusi legal atau prostitusi di lingkungan lokalisasi resmi, yaitu modusnya para pelaku dan konsumen melakukan transaksi seks langsung di lokalisasi, baik melalui gerbang maupun langsung dengan pelaku.
 - b. Prostitusi jalanan, modusnya pelaku menjajakan diri di tempat-tempat tertentu yang tidak resmi. Biasanya konsumen langsung melakukan transaksi dengan pelaku.
 - c. Prostitusi bentuk lain, modusnya bisa konsumen secara langsung berhubungan atau melakukan transaksi dengan pelaku, bisa juga melalui makelar atau penghubung.
 - d. Prostitusi modern, yaitu umumnya bermoduskan melalui jaringan internet atau sering disebut prostitusi online.³⁰

4. Prostitusi dalam aspek Sosial

Eksplotasi seks berarti penghisapan atau penggunaan serta pemanfaatan relasi seks semaksimal mungkin oleh pihak pria. Sedangkan komersialisasi seks berarti perdagangan seks dalam bentuk penukaran kenikmatan seksual dengan benda-benda, materi, dan uang³¹ Maka dalam pelacuran ini ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria, atas perjanjian pemberian “keuntungan” pada kedua belah pihak atau para pelakunya.

Perbuatan melacurkan diri ini ada yang dilakukan hanya sebagai kegiatan sambilan atau pengisi waktu senggang (*amateurism*) dan ada pula yang melakukannya sebagai pekerjaan penuh atau sebagai profesi. Selain itu

³⁰ Sumitro Hadi Kusuma, Prostitusi dalam Tumbuh Kembangnya, Bulan Bintang, Surabaya, 1998, halaman 6

³¹ Kartini Kartono, op.cit. h.185

pelacuran ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja, melainkan dapat pula dilakukan oleh kaum laki-laki yang disebut sebagai “gigolo”.

Dalam kajian sosial, prostitusi merupakan fenomena masyarakat yang mesti dicarikan solusi sosialnya dengan cermat, mengingat perbuatan prostitusi adalah perbuatan menyimpang dan amoral, serta berdampak sosial terutama merusak tatanan lingkungan terutama menyebabkan peniruan, eksekusi kejahatan lain, seperti perjudian, perkosaan, dan bahkan pencurian maupun pembunuhan. Oleh karenanya masyarakat mengutuknya.

Dalam kacamata masyarakat, pelacuran atau prostitusi harus dibasmi, tidak jarang kegiatan ini menimbulkan reaksi sosial masyarakat, seperti aksi pembakaran tempat-tempat lokalisasi baik yang resmi maupun ilegal, atau menentang kebijakan pemerintah terhadap lokalisasi dengan mengajukan class action atau aksi unjuk rasa kepada pembuat kebijakan, seperti yang dilakukan masyarakat Blimbing terhadap lokalisasi Kalisari Kota Malang menjelang bulan puasa.³²

5. Prostitusi dalam Aspek Agama

Dari aspek agama, khususnya dalam ajaran islam, pelacuran menurut hukum islam secara tegas dilarang, karena termasuk perbuatan zina, sedang zina merupakan termasuk perbuatan yang sangat dikutuk dan dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam Al’quran surat Attaubah ayat 58 bahwa :

³² Jawa Pos, 27 Desember 1999

“Jauhilah perbuatan zina, karena zina itu termasuk perbuatan keji dan jalang”

Hukuman bagi pezina dalam hukum islam adalah dengan dirajam, yang dilakukan di depan masyarakat umum, dengan tujuan agar masyarakat umum tidak meniru perbuatan serupa.

6. . Prostitusi dalam Aspek Kriminologis

Sedangkan dari aspek kriminologis, suatu pelacuran merupakan suatu permasalahan fenomena kriminogen yang semestinya keberadaanya harus dicermati, karena dengan pelacuran menimbulkan dampak lain munculnya kriminalitas, seperti perjudian, minuman keras atau narkoba.

Prostitusi umumnya identik dengan dunia narkoba, minuman keras dan perjudian. Dalam kawasan lokalisasi prostitusi terdapat parkatek perjudian, mabuk-mabukan dan narkoba. Bahkan seringkali di kawasan itu terjadi kekerasan-kerasan seksual maupun perkelahian dan bahkan pembunuhan.

Juga tidak jarang suatu kejahatan tertentu seperti pencurian dan perampokan, pemicunya karena pelaku ingin menikmati kepuasan seksual di lokalisasi prostitusi. Demikian juga dengan transaksi narkoba atau penadahan hasil kejahatan lainnya, dilakukan di kawasan ini.

Artinya bahwa menurut kajian kriminologis sudah sangat mendesak untuk dilakukan kajian faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan prostitusi, sebagailangkah antisipatif agar dampak kriminogen dari prostitusi ini tidak muncul secara meluas.

Kajian dimaksud tentu secara komprehensif, dengan tidak hanya memperhatikan aspek etiologi kriminal (krimonilogi) semata, tapi aspek lain seperti aspek budaya, aspek psikologis dan statistik, serta terutama aspek kebijakan publik.³³

7. Prostitusi dalam aspek Yuridis

Yang sangat disayangkan sampai saat ini, walaupun masalah pelacuran sudah semakin meningkat di Indonesia, Indonesia belum mempunyai peraturan-peraturan yang secara khusus mengatur mengenai larangan orang melakukan perbuatan pelacuran atau prostitusi. Di dalam KUHP hanya diatur larangan bagi mereka-mereka yang mengeksploitasi para pelacur, yang dilakukan oleh mucikari dan germo. Bagi germo, larangan itu terdapat pada pasal 296 KUHP yang berbunyi³⁴

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Sedangkan terhadap mucikari, larangannya terdapat dalam pasal 506

KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

*Barangsiapa sebagai mucikari mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.*³⁵

³³ Kartini Kartono, op.cit. h.185

³⁴ R.Sugandhi, op.cit. h.313

³⁵ Ibid, h.514

Prostitusi yang merupakan masalah yang paling kabur dalam hukum pidana adalah permasalahan seks dan sosial yang sangat kompleks sehingga membutuhkan penguasaan yang sulit. Prostitusi dikatakan sisi yang paling kabur dalam KUHP karena belum jelas apakah prostitusi memang suatu kejahatan jika dilihat dari segi yuridis. Jika memang demikian mengapa hukum pidana (KUHP) tidak secara tegas dan gamblang dalam menetapkan prostitusi / pelacuran sebagai suatu kejahatan. Kemudian apakah sanksi dalam bentuk pidana dapat diterapkan secara tepat ? Oleh karena itu problema pelacuran ini sangat sulit untuk dicarikan jalan keluarnya.³⁶ Keberadaan lokalisasi atau lebih tepat jika disebut legalisasi pelacuran akan tampak sangat bertentangan dengan isi pasal 296 KUHP seperti yang telah disebutkan di atas.

Oleh karena itu dengan tidak adanya pasal yang mengatur dalam KUHP, perbuatan melacur dari WTS bukan dianggap sebagai kejahatan menurut pandangan hukum (*legal of definition crime*) Sesuai dengan salah satu azas dalam hukum pidana, yaitu “azas legalitas”, bagaimanapun jahatnya suatu perbuatan, bila hal itu tidak dilarang secara tegas dalam perundang-undangan pidana, maka bukan dianggap sebagai suatu kejahatan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sutherland dan Cressey.³⁷ Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi : *“tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.”*³⁸

³⁶ R.J.E. Sahetapy, op.cit, h.154-155

³⁷ Sutherland & Cressey, 1974, h.4 dikutip oleh A.S. Alam, op.cit, h.66

³⁸ R.Sugandhi, op.cit, h.5

Jika dipandang dari segi definisi kejahatan menurut hukum pelacuran bukanlah suatu kejahatan, maka hal itu sangat bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan, yakni yang disebut sebagai perbuatan jahat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang masih hidup dalam masyarakat³⁹. Dari sudut pandang agama, kebudayaan, dan kesusilaan dari berbagai golongan masyarakat di Indonesia, pelacuran masih dianggap sebagai suatu kejahatan yang berat dan harus dihukum.⁴⁰

B. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Prostitusi

Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan banyak individu yang tidak mampu menyesuaikan diri, sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan serta konflik-konflik internal dan eksternal. Peristiwa-peristiwa tersebut memudahkan individu menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku, salah satunya adalah pola pelacuran untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah alam pembangunan di Indonesia.⁴¹

Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran menurut Kartini Kartono, antara lain adalah :⁴²

- b) Tidak adanya UU yang melarang prostitusi atau pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan

³⁹ R.J.E. Sahetapy, loc.cit

⁴⁰ A.S. Salam, loc.cit.

⁴¹ Ibid, h.206-207

⁴² Ibid, h. 207-208

- c) Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya diluar ikatan perkawinan.
- d) Komersialisasi dari seks, baik di pihak wanita maupun germo-germo dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks.
- e) Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati. Hal ini sesuai dengan teori hipotesa patologi yang mendukung mahzab biologinya Lombrosso pada aliran Positivis⁴³
- f) Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia.
- g) Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitir kaum lemah / wanita untuk tujuan-tujuan komersil ;
- h) Ekonomi Laissez-Faire menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan pula dalam relasi seks ;
- i) Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan setempat. Hal ini sesuai dengan Teori Konflik Kebudayaan pada mahzab sosiologis yang dipelopori oleh T. Sellin, yang berbunyi bahwa kejahatan itu disebabkan karena adanya konflik kebudayaan, yaitu terjadinya konflik terhadap nilai-nilai sosial, kepentingan maupun norma-norma yang ada di masyarakat.

⁴³ W.A. Bonger, *Inleiding Tot de Criminologie*, diterjemahkan oleh B.M. Reksodipoetro, *Pengantar tentang Kriminologi*, Cetakan ke-6 PT. Pembangunan, 1982, h.84

Menurut Benediktus Bosu, faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya prostitusi / pelacuran adalah ;⁴⁴

- 1) Faktor ekonomi, faktor ini didukung dengan teori ekonomi pada mazhab sosiologis yang dipelopori oleh W.A Bonger. Teori ini didasarkan pada masalah pengangguran sehingga timbul kemiskinan yang kemudian mengakibatkan meningkatnya kejahatan di masyarakat.⁴⁵
- 2) Faktor perkawinan, misalnya kawin dalam usia yang terlalu muda.
- 3) Karena faktor hobby, yaitu gemar untuk melakukan hubungan seks dengan sembarang laki-laki dan mereka menyatakan tidak puas apabila hanya melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki saja
- 4) Karena malas bekerja.
- 5) Karena pengaruh lingkungan, misalnya karena ingin hidup mewah atau karena tetangganya banyak yang pelacur. Hal ini sesuai dengan teori yang dipelopori oleh G. Tarde yang menyangkal teorinya Lombroso, yaitu ia menyatakan bahwa kejahatan adalah merupakan gejala sosiologis, bukan gejala antropologis. Salah satu gejala sosiologis yang dapat menyebabkan kejahatan adalah adanya teori peniruan (*imitation*), yaitu peniruan terhadap lingkungan yang ada disekitarnya.⁴⁶ Selain itu juga didukung dengan teori “*Differential Association*”, tokohnya adalah E.H. Sutherland. Dalam salah satu preposisinya dikemukakan bahwa kejahatan itu timbul karena adanya interaksi yang terjalin dalam kelompok personal yang intim, yaitu ada

⁴⁴ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h.55-56

⁴⁵ Benediktur Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, h. 55-56

⁴⁶ Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 104

komunikasi antar yang satu dengan yang lain. Sehingga menurut preposisi ini belajar kejahatan itu tidak melalui proses belajar, tetapi karena merupakan proses peniruan.⁴⁷

C. Upaya-upaya Penanggulangan Prostitusi

Kejahatan merupakan suatu peristiwa penyimpangan terhadap norma-norma atau perilaku teratur yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Kejahatan ini timbul dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan harus ditelaah secara menyeluruh bila hendak dicegah atau diatasi. Kejahatan ini disebabkan terdapatnya ketidakharmonisan antara kekuatan normatif dengan faktor-faktor ekspresif pada individu⁴⁸ Untuk menyelesaikan masalah kejahatan bukanlah merupakan suatu persoalan yang mudah, karena menyangkut faktor psikologis dan sosiologis, yang dikaitkan dengan faktor yuridis atau filosofis. Jadi intinya terletak pada keserasian antara *das sein* yang merupakan kenyataan dengan *das sollen* yang merupakan hal yang diidam-idamkan. Kejahatan yang selalu menimbulkan kerugian-kerugian fisik dan psikis dan bertentangan dengan aspek kemanusiaan dan keagamaan itu nampak pula dalam ajaran Pancasila⁴⁹

Dengan ini, maka *the prevention of crime* harus bersumber pada ajaran Pancasila. Salah satu aliran yang terdapat dalam *prevention of crime* ini adalah *sterilization of criminals*. Aliran ini berpendapat bahwa pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan jalan melakukan operasi fisik terhadap

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Noach, Simandjuntak. B. & Pasaribu. I., *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, h. 349

⁴⁹ ibid.

kriminal. Karena menurut aliran ini pembawaan itu merupakan sumber dari kejahatan, sehingga untuk mencegah kejahatan, maka sumber itu perlu dioperasi⁵⁰ Namun kemudian aliran ini ditentang oleh Ruth S. Cavan yang menyatakan bahwa aliran tersebut tidak sesuai dengan kenyataan sehingga tidak mungkin digunakan.⁵¹

Kegiatan-kegiatan lain yang penting dalam penanggulangan kejahatan adalah pendidikan karakter melalui pendidikan-pendidikan di sekolah-sekolah umum, pendidikan keagamaan yang terarah untuk dunia dan akhirat, klinik-klinik pembinaan anak-anak dan sebagainya. Dalam hal ini jelas bahwa obyek dari penanggulangan bukan kejahatannya, melainkan manusiamanusianya agar tidak melakukan kejahatan dan tidak menjadi korban kejahatan.⁵²

Sutherland menyatakan ada 2 (dua) jenis metode untuk *crime prevention*, yaitu⁵³

1. Mengurangi jumlah pengulangan kejahatan (*repeated crime*), baik terhadap residivis maupun para narapidana ;
2. mencegah terjadinya *first crime*.

Sedangkan Walter C. Reckless menggunakan istilah “*crime control*” dan “*prevention*” untuk penanggulangan kejahatan. Kemudian Reckless membedakan istilah *control* dan *prevention*. *Control* bagi Reckless adalah usaha untuk membatasi kejahatan pada batas-batas minimum, sedangkan *prevention* adalah usaha untuk menyetop, menghentikan perkembangan

⁵⁰ Ibid, h.350

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid, h.351

⁵³ Ibid.

kejahatan. Menurut Reckless, *crime control* meliputi tugas-tugas polisi, tugas pengadilan, tugas-tugas badan proteksi tertentu, dan lain sebagainya.⁵⁴

Namun sebenarnya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya ditujukan kepada para kriminal saja, melainkan juga terhadap para aparat penegak hukum, karena banyak terdapat peristiwa kriminal yang menempatkan aparat penegak hukum pada tindakan-tindakan yang keliru, misalnya belum tentu tersangka yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan adalah pelaku yang sebenarnya. Kekeliruan-kekeliruan inilah yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan dalam menjalankan jabatan as a crime against citizen. Oleh karena itu prevention terhadap kesalahan-kesalahan penegakan hukum, tangan-tangan hukum justru lebih penting agar keadilan dapat ditegakkan dalam arti yang sebenarnya.⁵⁵

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid, h. 353-354